

ABSTRAK

Irawan. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Buku Ilmiah dalam Hubungan Kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya tanpa mengurangi batasan apapun setelah diwujudkannya ciptaan dalam bentuk yang sebenarnya menurut prinsip deklaratif, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC. UUHC melindungi karya yang dihasilkan dari gagasan penulis yang diungkapkan dalam bentuk sastra, seni, atau karya ilmiah. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah buku sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas tercantum di dalam Pasal 35 UUHC yang dimaksudkan bahwa hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perlindungan hukum bagi Penulis atas karya cipta dalam hubungan kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sudah tertuang dalam perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban Penulis dan Penerbit. Namun dalam perjanjian tersebut tidak mengakomodir terkait hak ekonomi berupa imbalan Penulis karya cipta. Hasil dari analisis yang dilakukan bahwa terkait royalti dapat menggunakan aturan ketentuan PMK Nomor 136/PMK.02/2021. Royalti tersebut akan diberikan kepada Pencipta karya tulis yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang masih aktif ataupun sudah purna tugas. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hak ekonomi yang diberikan sesuai dengan UUHC. Akibat hukum terhadap komersialisasi karya cipta buku yang dihasilkan dari hubungan kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bahwa Pencipta karya ilmiah memiliki hubungan dinas yang merupakan hubungan kepegawaian antara Aparatur Sipil Negara dengan instansinya, maka yang dianggap Pencipta yaitu instansi pemerintah (Pasal 35 ayat (1) UUHC) dalam hal ini Penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai dengan surat perjanjian antara Pencipta dan Penerbit yang berisi bahwa Pencipta wajib menyerahkan hasil karya ciptaannya yang berbentuk naskah dan memberikan hak untuk diterbitkan oleh Penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, serta Penerbit berwenang untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan maka Penerbit sudah memiliki izin dari Pencipta untuk mengelola hak ekonomi (Pasal 9 ayat (2) UUHC). Namun, apabila Penerbit menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial, maka Pencipta yang dalam hubungan dinas tersebut wajib mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Kata Kunci: Komersial, Hak Cipta, Buku, Royalti.

ABSTRACT

Irawan. (2025). **Legal Protection for Academic Book Authors in Official Relations at Semarang Merchant Marine Polytechnic**. Master's Thesis, Faculty of Law, Diponegoro University.

Copyright constitutes an exclusive right vested in the creator, arising ipso facto upon the manifestation of the creation in a tangible form, in accordance with the declaratory principle, as enshrined in Article 1 (1) of the Indonesian Copyright Act (UUHC). The UUHC affords protection to works emanating from authors' ideas expressed in literary, artistic, or scientific forms. One of the protected forms of copyright is books, as stipulated in Article 40 (1) of the UUHC. The copyright generated by state officials/employees in the course of their official duties is governed by Article 35 of the UUHC, which regulates the employment relationship between state officials and their institutions.

This research employs a normative juridical approach. The research data is obtained through a literature study, which is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

This study reveals that legal protection for authors of creative works in official relations at the Semarang Merchant Marine Polytechnic is stipulated in a written agreement governing the rights and obligations of authors and publishers. However, the agreement fails to provide for authors' economic rights in the form of royalties. Analysis indicates that royalties can be determined in accordance with PMK Number 136/PMK.02/2021. Royalties will be granted to creators of written works who are active or retired civil servants. This suggests that economic rights protection exists in accordance with copyright law. The legal implications of commercializing creative works books resulting from official relations at the Semarang Merchant Marine Polytechnic are that creators of scientific works in official relationships are deemed to be institutions, specifically the publisher of the Semarang Merchant Marine Polytechnic (Article 35 (1) of the Copyright Law). The agreement between creators and publishers stipulates that creators must submit their creative works in manuscript form and grant publishers the right to publish. Publishers have the authority to determine all matters related to sales and have obtained permission from creators to manage economic rights (Article 9 (2) of the Copyright Law). However, if publishers use creative works for commercial purposes, creators in official relationships are entitled to receive royalties.

Keywords: Commercial, Copyright, Book, Royalty.